

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sampai saat ini masih bergejolak, salah satu yang masih menjadi sumber pergolakannya adalah masalah Palestina. Permasalahan Palestina pada kenyataannya memperlihatkan tatanan politik luar negeri berbagai negara, termasuk negara-negara yang berada dalam kawasan Timur Tengah. Dari seluruh negara yang termasuk di kawasan Timur Tengah ataupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Iran adalah negara yang menarik untuk disorot dalam hal kebijakan politik luar negerinya, karena perjalanan sejarah negeri ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi di Palestina.

Republik Islam Iran merupakan negara yang mengalami pasang surut dalam mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan Palestina, negara yang sering disebut negeri kaum Mullah ini adalah negara yang mengalami perubahan kebijakan politik luar negerinya mengenai Palestina secara dramatis. Hal tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Syah Reza Pahlevi sebagai seorang raja dan pasca Iran mengalami sebuah Revolusi yang terjadi pada tahun 1979.

Iran pada masa pendeklarasian Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1948 belum menjadi negara yang berada di belakang Palestina seperti negara-negara Arab ataupun negara-negara timur tengah lainnya pada masa itu. Namun Pemerintahan ini masih berada dalam pengaruh barat yang kuat oleh karena itu kebijakan-kebijakan politik luar negeri maupun dalam negeri cenderung menguntungkan pihak Amerika Serikat dan Israel. Kedekatan antara Iran dan Israel pada masa itu menjadi salah satu keresahan warga negaranya sendiri salah satunya yang dirasakan oleh ulama besar Iran yaitu, Imam Khomeini hal tersebut tersirat dalam ucapannya pada 3 Juni Tahun 1963 sebagai berikut:

Saya diberi tahu hari ini bahwa sejumlah penceramah dibawa ke kantor badan keamanan (SAVAK) dan diperingatkan bahwa mereka boleh berbicara apapun kecuali tiga hal, yaitu: mengatakan keburukan atas Syah, menyerang Israel dan mengatakan Islam dalam bahaya. Masalahnya

adalah, jika kita tidak mengatakan tiga hal tersebut, maka apa lagi yang mesti dikatakan selain itu? Semua kesulitan kita, tanpa kecuali, berasal dari tiga hal tersebut (Khomeini, 2004: 84).

Pernyataan Imam Khomeini di atas menyiratkan beberapa hal, salah satunya adalah pemerintahan Iran berupaya menutup segala keburukan pemerintahannya, Pahlevi pun menjamin keberadaan Israel selama Ia berkuasa dan pada dasarnya Ia menggambarkan kuatnya hubungan pemerintahannya dengan kaum zionis. Apa yang terjadi dalam pemerintahan Pahlevi terlebih mengenai jalinan kerjasama antara Pahlevi dengan Israel bukannya tanpa disadari oleh masyarakat Iran sendiri dan pada akhirnya permasalahan Palestina merupakan salah satu faktor pendorong pergerakan kaum Islam Fundamentalis untuk melaksanakan gerakan pembaharuan, semasa hidupnya Imam Khomeini pun berkali-kali menegaskan, perlawanan rakyat Iran terhadap rezim Syah mendapat inspirasi dari perjuangan bangsa Palestina, dan bahwa tujuan akhir revolusi Islam Iran adalah pembebasan Palestina. Dengan kata lain, “revolusi belum selesai selama Palestina masih dijajah Israel” (Khomeini, 2004: xxi).

Pergerakan Khomeini didasarkan pada usaha mewujudkan sebuah pemerintahan yang bebas dari pengaruh barat, atau pemerintahan Islam yang berbasis pada Al-Quran. Perjuangannya dianggap berbahaya sehingga Khomeini pun diasingkan ke Perancis pada November 1964 (Labib et al, 2006: 10), Usaha melengserkan Pahlevi pun berjalan secara tidak langsung, segala pemikirannya dituangkan dalam buku yang lahir di pengasingan. Dengan jalan yang cukup panjang terjadilah sebuah revolusi pada 10 Februari 1979. Setelah itu mulailah sebuah pemerintahan baru dengan tatanan kenegaraan yang menggunakan syariat Islam oleh karena itu revolusi tersebut kita kenal dengan sebutan revolusi Islam Iran. Di tahun yang sama juga tepatnya 7 Agustus 1979, Imam Khomeini membuat sebuah gertakan bagi kaum muslimin di dunia untuk sama-sama memperhatikan kondisi Palestina dengan menetapkan Hari Al Quds Sedunia, berikut adalah ucapan beliau saat menetapkan hari besar tersebut:

“saya menyeru seluruh kaum Muslim di dunia untuk menjadikan jumat terakhir di bulan suci Ramadhan sebagai Hari al-Quds; dan melalui

demonstrasi solidaritas kaum muslim sedunia, mengumandangkan dukungan mereka atas hak-hak rakyat Muslim” (Khomeini, 2004: 225).

Mewujudkan cita-cita menghilangkan dominasi Israel dan Amerika Serikat tidak perlu menunggu lama, dengan tanpa ragu-ragu pemerintahan Iran yang baru, mengganti Kedutaan Besar Israel untuk Iran menjadi Kedutaan Besar Palestina dan diikuti dengan pengusiran para diplomat Amerika di Taهران. Tak berselang lama juga PLO yang diketuai oleh Yasser Arafat menjadi tamu kenegaraan pertama di negeri yang berubah menjadi Republik Islam Iran tersebut (Khomeini, 2004: xxi). Satu tahun setelah pendeklarasian kemerdekaan Palestina tepatnya pada tanggal 3 Juni 1989 sang imam besar wafat. Sepeninggal Imam besar Ayatullah Khomeini, Iran pun tetap menjadi Republik Islam Iran namun yang menjadi menarik adalah bagaimana kelanjutan kebijakan politik luar negeri pemerintahan Iran. Karena Iran sendiri memiliki politik dalam negeri yang dinamis.

Birn Izdy memaparkan lima fase kebijakan luar negeri Iran mengenai permasalahan Palestina dalam bukunya yang berjudul "*Madkhal Ela Al-Siyasah Al-Kharigiyah Li-Gumhouriyat Eiran Al-Eslamiyah*" (1999) , penjelasan tersebut dikutip oleh Taryudi dalam artikel yang berjudul strategi politik Iran di jalur Gaza (<http://www.eramuslim.com>), Dr. Birn Izdy adalah mantan petinggi di kementerian luar negeri Iran. Periodesisasi yang ia buat adalah sebagai berikut:

Fase Pertama: 1979-1980, dimana kubu liberal-konservatif memegang kebijakan neo-konservatif dalam upaya menjalin hubungan bilateral antara Iran dan masyarakat internasional. Fase Kedua: 1980-1988, yang bisa disebut sebagai fase radikal pola interaksi Iran kepada bangsa dunia tanpa mengindahkan mediasi pemerintahan, yang justru mengakibatkan instabilitas dalam negeri Iran. Fase Ketiga: 1988-1997, menunjukkan sikap moderat, menerapkan pola santun strategi luar negeri Iran, dan obsesi memperbaiki serta meningkatkan harmonisasi hubungan bilateral. Presiden Hasyemi Rafsanjani bersama Menlu nya Dr. Ali Akbar Vilayati berhasil menata kembali keretakan hubungan Iran dengan masyarakat dunia. Beberapa pointer yang dicapai, antara lain: eksistensi pemerintahan Revolusi Iran mendapat pengakuan negara-negara kawasan Teluk

Arab; pencabutan isolasi masyarakat internasional atas Iran paska revolusi; penerimaan Barat dan dibukanya pangsa pasar Eropa; legalisasi dunia atas revitalisasi angkatan perang Iran; penyebaran pemikiran revolusi melalui kran kebudayaan; dan, Iran diajak menyelesaikan krisis di Afghanistan dan kawasan Timteng.

Fase Keempat: 1997-2005, semasa Muh. Khatami berkuasa. Pandangan reformisnya seringkali menimbulkan konflik internal dengan kubu konservatif yang loyal memelihara amanat revolusi. Ini pulalah yang menjadi akar carutmarutnya pemerintahan dalam negeri Khatami. Lain halnya mengenai iklim politik luar negeri Iran, Khatami benar-benar lentur terhadap Barat bahkan untuk pertama kalinya ia mengadakan kontak politik dengan Moshe Katsav, Presiden Israel pada April 2005, hal yang tak pernah dilakukan pendahulunya semenjak revolusi ditabuh.

Dari paparan mengenai fase-fase di atas dapat ditafsirkan bahwa seorang pemimpin negara dalam hal ini seorang presiden memiliki peran yang sangat penting dalam pengambil langkah dan arah kebijakan politik luar negeri Iran. Latar belakang seorang presiden mempengaruhi dinamika politik luar negeri Iran yang tidak bisa terlepas dengan hubungan Iran dengan negara-negara barat ataupun negara Timur Tengah lainnya. Tidak bisa dipungkiri setelah revolusi Iran, negara tersebut menjadi sorotan dunia, Iran dinilai sebagai sebuah negara yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dan Israel, oleh karena itu dinamika yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Iran sebagaimana yang dipaparkan Birn Izdy bisa berdampak pada sikap Iran dalam isu Palestina.

Sampai pada masa pergantian presiden Iran yang keenam ke yaitu dimasa pencalonan pertama Mahmoud Ahmadinejad pada 2005, dunia seolah kembali dalam situasi dimana pergolakan antara Iran dan dunia barat kembali meningkat. Ahmadinejad menjadi sosrotan besar di segala pemberitaan baik media Barat maupun media Iran sendiri. Hal tersebut dikarenakan sejak pencalonannya Ahmadinejad telah menunjukkan afiliasinya pada kubu ultra-konservatif atau kaum fundamentalis (*ushuuli*) yaitu berarti konsisten memegang nilai-nilai Islam dan revolusi. Ia merasa budaya politik Iran sudah keluar kontrol selama beberapa

tahun kebalakang (terutama pada masa pemerintahan khatami), makna istilah “fundamentalis” sendiri menurut Ahmadinejad berarti konsistensi memegang teguh nilai-nilai Islam dan revolusi (El-Gogary, 2006: 45). Ahmadinejad pun terpilih secara dramatis sebagai presiden selanjutnya mengalahkan mantan presiden Iran periode 1989-1997, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.

Sosok Ahmadinejad yang menempatkan dirinya seorang fundamentalis dan revolusionis adalah alasan mengapa penulis memfokuskan penelitian ini pada masa pemerintahan Ahmadinejad, atau merupakan fase kelima dari paparan Dr. Birn Izdy . Seperti di paragraf sebelumnya Ahmadinejad mengingatkan kita pada sosok Imam Khomeini sebagai pelopor terjadinya revolusi 1979, dan Ahmadinejad pun hadir di saat pemerintahan Khatami sudah dinilai memasukan nilai-nilai liberalisme yang bertolak belakang dengan prinsip kaum fundamentalis. Perjalanan pemerintahan Ahmadinejad sangat menarik, karena Ia dihadapkan pada berbagai macam tantangan baik dalam negeri dengan lawan-lawan politik yang menjadi oposisi pemerintah nya yang tentu tidak sepenuhnya sepaham dengan kebijakan-kebijakan dengan Ahmadinejad. Selain itu tantangan lainnya datang dari hubungan Iran dalam peta geopolitik dunia terlebih erat hubungannya dengan Israel dan negara-negara pendukung Israel seperti Amerika Serikat, begitu pula tantangan Ahmadinejad dalam mewujudkan revolusi yang sebenarnya, revolusi Islam yang belum berakhir selama Palestina belum lepas dari belenggu Israel seperti amanah dari sang Imam besar Khomeini tentang keterhubungan Revolusi Islam dengan gerakan Pembebasan Palestina. Bukanlah hal yang mudah untuk kembali mengembalikan Iran seperti Iran pasca revolusi 1979, yang sudah terpatri seperti Iran yang anti barat, fundamentalis dan dapat bertahan dalam konstelasi politik liberalis yang sangat dihindari Iran.

Penelitian ini bukan hanya semata-mata menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri Iran selama masa pemerintahan Ahmadinejad mengenai Palestina saja, namun pada dasarnya juga menyoroti solusi atau jalan tengah yang diupayakan Iran untuk menyelesaikan segala kerumitan dan permasalahan yang terjadi di Palestina. Terlebih dalam masa pemerintahan Ahmadinejad yang berlangsung dua periode yaitu 2005-2009 dan 2009-2013 konflik Palestina dan

Israel seolah berada dalam situasi yang semakin memprihatinkan dengan berlasungnya blokade jalur Gaza pada tahun 2007 dan terjadinya agresi besar pada Gaza yang diawali dengan serangan udara di langit Gaza pada 27 Desember 2008 (Zulkifli,2009:15) situasi tersebut berlangsung cukup lama hingga 21 Januari 2009. Blokade Gaza bukan hanya blokade secara wilayah namun juga blokade secara ekonomi bahkan segala macam bantuan asing yang datang hanya bisa disalurkan mengguakan angkutan darat saja, bantuan yang masuk sulit untuk menembus Gaza apabila disalurkan dengan transportasi laut ataupun udara, hal ini tercermin dalam peristiwa penyerbuan kapal laut Mavi Marmara yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2010 menewaskan 9 warga negara Turki dan melukai 50 relawan yang berasal dari berbagai negara tersebut.

Konflik Palestina dan Israel sendiri telah berlangsung cukup lama kurang lebih enam puluh tahun lebih . Sejak masa imperium Ustmani bahkan sebelumnya dimasa kekhalifahan Islam, di tanah Yerusalem ini terdapat tiga kelompok masyarakat yang berbeda dalam keyakinan yaitu Islam, Kristen dan Yahudi oleh karena itu Yerusalem juga disebut sebagai kota suci tiga agama. Pada saat itu ketiga unsur masyarakat tersebut bisa hidup berdampingan, situasi ini berubah sejak seorang penulis bernama Theodor Herzl seorang Yahudi asal Hongaria yang menyerukan pendirian sebuah negara Yahudi di Palestina, atau di tempat lain gagasan ini tertulis dalam bukunya berjudul *Der Judenstaat* pada 1896.

Situasi pun berkembang pada saat adanya dukungan Inggris terhadap gagasan tersebut dalam sebuah Deklarasi yaitu, *Deklarasi Balfour* pada November 1917, sejak itu pula terjadi pendudukan Palestina oleh Inggris. Sampai akhirnya Inggris mengalihkan pendudukannya pada orang-orang Yahudi dan terjadilah pendeklarasian berdirinya sebuah negara bernama Israel pada 14 Mei 1948. Hal ini terjadi sebagai dampak dari peristiwa *holocaust* yang dilakukan oleh NAZI terhadap Yahudi di wilayah kekuasaan NAZI pada saat perang dunia ke II, pemberian tanah Palestina dinilai sebagai solusi atas holocaust yang dialami orang-orang Yahudi. Alasan mengapa bangsa Yahudi memilih kawasan Palestina adalah karena sejarah awal lahirnya agama yahudi adalah ditanah Yerusalem dan

alasan lainnya tercermin dalam slogan mereka yaitu, *a land with no people with no land*, Palestina adalah tanah tanpa penduduk yang diperuntukan bagi bangsa yang tidak memiliki tanah. Dimulai lah *Al-Nakba* atau hari malapetaka bagi rakyat Palestina hingga kini (Sulaeman, 2008: 66-94). Sejak itu pula terjadilah pengusiran besar-besaran warga Palestina, sehingga sebagian besar rakyat menjadi pengungsi di berbagai negara yang terdekat. Sedangkan untuk warga yang tetap bertahan mulai terisolasi dalam intimidasi-intimidasi militer israel.

Oleh karena itu berdasarkan asumsi di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran Pada Masa Pemerintahan Ahmadinejad Terhadap Masalah Palestina 2005-2013. Maksud yang terkandung pada judul di atas adalah tanggapan, sikap dan pendirian yang diperlihatkan oleh presiden Ahmadinejad yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya mengenai Palestina yang dikeluarkan selama masa jabatannya sebagai presiden yaitu pada tahun 2005 sampai dengan 2013 terhadap permasalahan atau konflik yang terjadi di Palestina.

## 1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan utama yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana kebijakan politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad terhadap penyelesaian masalah Palestina 2005-2013?”. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis membatasinya dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana gambaran situasi sosial-politik yang terjadi di Iran sebelum Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden ?
2. Apakah yang menyebabkan Iran melibatkan diri dalam upaya penyelesaian Konflik Palestina-Israel?
3. Peran apakah yang dilakukan Ahmadinejad dalam upaya mengatasi permasalahan Palestina selama masa kepemimpinannya sejak 2005-2013?

4. Bagaimana dampak kebijakan politik luar negeri Ahmadinejad terhadap upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk memaparkan kebijakan politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad terhadap masalah Palestina 2005-2013. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan situasi sosial-politik yang terjadi di Iran sebelum Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden.
2. Menganalisis penyebab Iran melibatkan diri dalam upaya penyelesaian Konflik Palestina-Israel.
3. Mendeskripsikan peran apasaja yang dilakukan Ahmadinejad dalam upaya mengatasi permasalahan Palestina selama masa kepemimpinannya sejak 2005- 2013.
4. Mengidentifikasi dampak kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan Ahmadinejad terhadap upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak antarain sebagai berikut:

1. Untuk Jurusan Pendidikan Sejarah UPI :
  - a. Sebagai upaya memperkaya tulisan mengenai sejarah Asia Barat Daya/Timur-Tengah di Jurusan Pendidikan Sejarah Khususnya mengenai Sejarah Iran dan Palestina.
  - b. Lebih lanjut bisa dijadikan bahan rujukan dalam mata kuliah lainnya seperti sejarah kebangkitan negara-negara Asia.



## 2. Untuk Peneliti :

Kelak sebagai tenaga pengajar dapat memberikan pendalaman materi dalam pembahasan bahan ajar di kelas XII yaitu pada perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai dengan perkembangan mutakhir.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode historis yang merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah. Metode historis yaitu, suatu proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Sjamsuddin, 2007: 17-19). Begitupun dengan penjelasan yang diberikan oleh Gottschalk mengenai metode Historis yaitu suatu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Dalam penelitian ini dituntut menemukan fakta, menilai dan manfsirkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan objektif untuk memahami masa lampau. Selain itu metode historis juga mengandung pengertian sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008: 39).

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismaun (2005:48-50), adalah sebagai berikut:

#### 1. Heuristik

Ini adalah tahapan awal dari penulis untuk melakukan penelitian heuristik merupakan pengumpulan sumber-sumber yang dianggap sesuai dengan topik yang dipilih. Cara yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, melalui: buku-buku, website, jurnal, dokumen, juga artikel-artikel dari berbagai surat kabar yang berkaitan dan dinilai relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam hal ini mengenai kebijakan politik luar negeri Iran yang menyangkut dengan permasalahan Palestina. Dalam mencari sumber penulis mencari

diberbagai perpustakaan antara lain perpustakaan UPI, Perpustakaan Museum Asia-Afrika, perpustakaan Universitas Indonesia, perpustakaan Departemen luar negeri (Ali Alatas) dan perpustakaan CSIS, juga dilakukan dengan mencari buku-buku yang berkaitan di toko-toko buku antara lain Palasari, Gramedia, Dewi Sartika. Namun penulis tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya wawancara dengan perwakilan dari kedua negara yaitu, Iran dan Palestina melalui Kedutaan Besar yang berada di Jakarta, wawancara ini dilakukan demi terkumpulnya sumber-sumber yang bisa dipergunakan untuk tahapan penelitian selanjutnya.

## 2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber ditemukan maka tahapan selanjutnya yang penulis lakukan adalah dengan melakukan kritik sumber. Tahapan ini sangat perlu untuk dilaksanakan karena akan sangat mempengaruhi hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Kritik sumber terdapat dua bagian yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana otentisitas dari sumber yang diperoleh. Apabila penulis melakukan sumber dalam bentuk lisan maka penulis wajib mempertimbangkan hal-hal seperti latar belakang sumber, umur, ataupun daya ingat sumber lisan tersebut dengan begitu penulis bisa mendapatkan sumber lisan yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya. Namun apabila sumber yang penulis gunakan berupa sumber tertulis maka penulis akan melakukan kritik eksternal dengan mencari kebenaran sumber dengan membuktikan keotentikan sumber tersebut atau sesuaikah sumber tersebut untuk digunakan. Selanjutnya akan dilakukan kritik internal, kritik ini merupakan sebuah upaya dari penulis untuk menelaah isi dari sumber-sumber yang ditemukan. Apabila ditemukan sumber yang saling bertentangan maka penulis diwajibkan untuk mencari sumber pembanding, hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta dari sumber yang benar-benar relevan dan sesuai dengan masalah yang penulis angkat.

## 3. Interpretasi

Tahap ini merupakan tahap ketiga dalam penelitian sejarah, dalam tahap ini penulis memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang

diperoleh pada tahapan sebelumnya. Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan atau merangkaikan fakta-fakta satu sama lainnya sehingga mendapatkan sebuah gambaran berupa deskripsi yang jelas mengenai segala bentuk kebijakan politik luar negeri Iran mengenai permasalahan Palestina selama masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad pertama pada tahun 2005 sampai dengan 2013.

#### 4. Historiografi

Tahapan ini adalah tahap akhir dari penelitian sejarah, yaitu dengan menulis hasil penelitian yang telah dilakukan, tentu merupakan buah dari ketiga tahap penelitian yang sudah dijalankan. Historiografi menurut Sjamsuddin (2007: 156) dilakukan dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan dengan jelas dan gaya bahasa yang sederhana juga menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar. Tulisan tersebut penulis tuangkan dengan judul “Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Islam Iran Pada Masa Pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad Terhadap Masalah Palestina (2005-2013)”.

### 1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun Sistematika dalam penulisan penelitian ini menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan latar belakang sejarah melakukan penelitian ini. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan agar tidak melebar maka dicantumkan perumusan dan pembatasan masalah sehingga permasalahan dapat dikaji dalam penulisan skripsi. Pada bagian akhir bab ini akan dimuat tentang metode dan teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan dan bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritik dan Tinjauan Kepustakaan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber buku dan sumber lainnya yang digunakan sebagai referensi yang dianggap relevan. Dijelaskan pula tentang beberapa kajian dan penelitian terdahulu mengenai sejarah Iran, Palestina dan hubungan kedua

nya. Dan dalam bab ini pula dijelaskan tinjauan teoritis yang akan menjadi kerangka berpikir penulis dalam memaparkan dan menganalisa temuan-temuan atau fakta-fakta mengenai penelitian ini. Dan dalam bab ini pula kan dijelaskan konsep yang menunjang dalam pembahasan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini diterangkan mengenai serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna mendapatkan sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis. Diantaranya heuristik yaitu proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Setelah heuristik, maka langkah selanjutnya adalah kritik, yaitu proses pengolahan data-data yang telah didapatkan dari langkah heuristik sehingga data yang diperoleh adalah data yang reliabel dan otentik. Interpretasi adalah langkah selanjutnya setelah kritik dilakukan, yaitu penafsiran sejarawan terhadap data-data yang telah disaring. Selanjutnya tahap akhir adalah historiografi, yaitu penyajian penelitian dalam bentuk tulisan yang enak untuk dibaca dan dinikmati.

Bab IV Ahmadinejad dan Permasalahan Palestina. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai peran Iran dalam upaya penyelesaian permasalahan Palestina, dalam bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun pada Bab I.

Bab V Kesimpulan. Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini penulis juga menguraikan hasil-hasil temuannya tentang permasalahan yang dikaji pada penulisan ini.